

ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**OLEH :
AHMAD FAUZI R.
E121 11 262**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK
PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

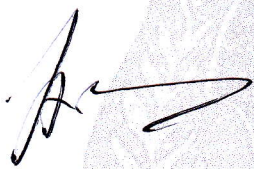
**AHMAD FAUZI R.
E121 11 262**

Telah dipertahankan di depan panitian ujian skripsi
Pada tanggal 20 Mei 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

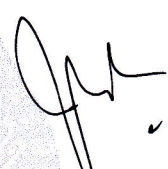
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. Gau Kadir, MA.
NIP. 19500117 198003 1 002

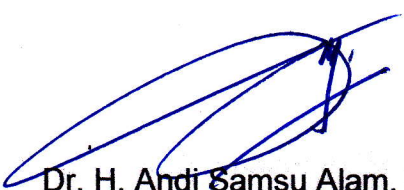


A. Murfhi, S.Sos, M.Si
NIP. 19720333328 20012 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK
PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

AHMAD FAUZI R.

E121 11 262

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2015,

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua : Dr. H. A. Gau Kadir, MA

Sekretaris : Rahmatullah S.IP, M.Si






Anggota : Dr. Hj. Nurlinah , M.Si

Anggota : Dr. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : A. Murfhi, S.Sos, M.Si.

Pembimbing I : Dr. H. A. Gau Kadir, MA

Pembimbing II : A. Murfhi, S.Sos, M.Si.

()
()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.

Serta selalu doa yang teriring oleh kedua orang tua penulis sehingga penulis bisa seperti ini sampai sekarang, teruntuk Ayahanda tercinta, Muhammad Rusli Alisyarif yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dan untuk ibunda tercinta St. Hamsiah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis sampai saat ini. Penulis

bukanlah apa-apa tanpa kalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk penyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Politik Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan dan segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP UNHAS khususnya jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
4. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP

UNHAS khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

5. Bapak H. A. Gau Kadir, M.A selaku pembimbing 1 dan bapak Andi Murfi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tempe, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sabbangparu, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanasitolo, Sekolah tingkat SD SMP SMA di Kecamatan Tempe, Sekolah tingkat SD, SMP, SMA di Kecamatan Tanasitolo, Sekolah tingkat SD, SMP, SMA di Kecamatan Sabbangparu, dan para informan serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Saudara-saudara penulis, Kak Fikar, Kak Fiki, yang telah banyak membimbing dan mendidik penulis selama ini, serta untuk adik Fadli yang telah merelakan laptopnya untuk digunakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat bangga dan menyayangi kalian.

8. Terima kasih yang tak terhingga untuk paman selaku Motivator Hidup penulis, H. Rifai Alisyarif yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
9. Terima kasih untuk Dian Reski Wijaya atas sumbangsih waktu, tenaga dan perhatiannya selama ini. Semoga Allah senantiasa membalas segala yang telah kau berikan untuk penulis.
10. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat semasa sekolah di SMAN 3 Sengkang Kabupaten Wajo, dan teristimewa untuk anak-anak 12 IPA 1 “12PAS”. Terimakasih untuk waktu kalian untuk mengukir sedikit cerita dari kebersamaan kita di masa putih abu-abu.
11. Terima kasih untuk orang-orang konyol yang telah lama mengenal penulis. Sahabat yang telah menjadi saudara bagi penulis, Reldy “pak Tile”, Furqan, Jha-ja, Dendy dan yang kami tuakan dari kami berdua bukan saja dari sifat tapi pastinya umur tidak bisa membohongi, K’ Bayu.
12. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Enlightenment 2011, Muh. Nurul Arifin “Kepala Suku”, Andis Rasyid, Assyam Siddiq W.G., M. Nur Fadholul Hijja, Gusti Zulkarnain T., Haryono Ansar, Hugo Itamar, Wismoyo Ade Saputro, Adithia Anbar, Nurul Hilal Bahnar, Adhyatma Pratama, A. Munzir Muin, M. Rijal, Amirullah Umar, Hendry Gunawan, Marwin, Muhammad Amirul Haq, Dody Prasetyo, Heri Gazali, Noer Gemilang S., Amril Pratama, Arman, Muh. Ade Fatria,

Ahmad Syaukani, Dewi Puspita Sari, Dwi Putri Maharani, Nila Tri Agustin, Ayuni Syamsu, Nursamsi Dwi Safitri, Sahriwana Nawir, A. Fadillah Wulandari, Nurul Soleha, Hardiyanti Kadir, Sulfiati Fahri, A. Tenri Wulang, Eka Kurniawati, A. Tenri Ummu, Novitasari Bendatu, A. Nur Mughni, Nadia Indriana T., Zulfiani Mas'ud, Delfawati Nadir, Khairina Almirah Rivai, Indriani Pallawa, Resky Widya Arlini dan Sri Indriani Novi. Terima kasih atas tangis, canda tawa, dan cerita yang telah kalian berikan. Kalian telah menjadi salah satu catatan sejarah hidup bagi Penulis. Penulis beruntung telah dipertemukan dengan Kalian. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN

13. Keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN Respublika 2006, Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014. Salam Merdeka Militan!

14. Terima kasih untuk Ayahanda tercinta Haryono Sulthan, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Bittoeng beserta jajarannya dan Bapak H. Muh. As'Ad sekeluarga yang telah banyak mengarahkan kami selama pelaksanaan KKN Unhas Gel. 87 serta seluruh warga Kelurahan Bittoeng Kabupaten Pinrang, serta teman-teman KKNers Gel.87 Terkhusus untuk "Bittoeng Corp" Frans Rombe Allo, Sudji Restu, Rusda Ananda, Melia Widya Pratiwi, Gustiana dan Siska Daud. Terima

Kasih telah menjadi keluarga dan saudara yang baik walaupun dalam waktu yang singkat.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Mei 2015

Penulis

INTISARI

Ahmad Fauzi R. E121 11 262. Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Dibimbing oleh Pembimbing I, Dr. H. A. Gau Kadir, MA. dan Pembimbing II, A. Murfi, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo; (2) menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Adapun informan penelitian ini Wakil Bupati Wajo, Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.

Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah

ABSTRACT

Ahmad Fauzi R. E121 11 262. Analysis of Local Government Role of Children Out of School in Wajo. Under Guidance are 1, Dr. H. A. Gau Kadir, MA. and Advisor 2, Andi Murfi, S. Sos, M.Sc.

This research was made to : (1) know and analyze district government role to push drop out of school children rate in Wajo regency; (2) descriptive caused factors of drop out of school children in Wajo regency.

This research used qualitative approach with descriptive type. Informant of this research was Vice regent of Wajo, Chief and staff of Educational Unit of Wajo regency, Unit Task of Educational Unit, School in primary school, junior high school, and senior high school level in three sub district, and also society. Data was taken by depth interview, observation and documentation as long as one month in field. Analysis data used descriptive-qualitative.

The result of research showed that : (1) effort of district government role to push children drop out of school rate in Wajo Regency which were to legalized wisdom in educational side, education financial aim, giving scholarship to poor society, poor student aim programme (BSM), and socialize to society; (2) based on case that have been found by researcher, caused factor of drop out children of school was lack of children interest to school, family condition that was unhappy, weak of family economy, the condition of the child's environment, people's views on education.

Key words: district government, drop out children of school

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan tentang Analisis	8
2.2 Tinjauan tentang Peranan	11
2.3 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	16
2.4 Tinjauan tentang Pendidikan.....	25

2.5 Tinjauan tentang Anak Putus Sekolah	34
2.6 Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi Penelitian	41
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Sampel Sumber Data	43
3.5 Analisis Data	44
3.6 Definisi Operasional	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis	47
4.1.2 Kependudukan	51
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya.....	53
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Wajo.....	62
4.1.5 Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo	65
4.1.6 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.	68
4.2 Peranan Pemerintah Daerah dalam Menekan Angka Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo	72
4.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah	87
BAB V PENUTUP	106

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	Luas Wilayah Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan	50
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo	52
4.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wajo Bidang Pendidikan	54
4.4	Daftar Nama Dinas di Kabuapten Wajo.....	66
4.5	Daftar Nama Lembaga Teknis Kabupaten Wajo	67
4.6	Kondisi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo	73
4.7	Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo.....	88
4.8	Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo.....	89

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Bagan Kerangka Konseptual	40
2	Peta Administrasi Kabupaten Wajo.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam

membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu investasi masa depan adalah suatu usaha yang sangat memegang peranan penting. Pendidikan akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat memanfaatkan dan menyikapi seluruh kesempatan dalam memenuhi dan memperjuangkan kehidupan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan akan menjadi budak globalisasi, yang mengombang-ambingkan kehidupannya dalam ketidakmampuan baik secara moril dan materil.

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula.

Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenjam pendidikan ataupun sudah dapat mengenyam akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. *Desentralisasi pendidikan* berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15).

Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten dan kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat.

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di kabupaten wajo setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak putus sekolah pada tahun 2014 mencapai angka 703 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pemerintah Kabupaten Wajo bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengeyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan

didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wajo. Olehnya itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Wajo?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

1.4. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah terhadap anak putus sekolah.
2. Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dalam pendidikan terutama dalam mengatasi anak putus sekolah.
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang akan dilaksanakan.

2.1. Tinjauan tentang Analisis

Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah pun dapat diketahui.

Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, menganalisis merupakan :

“Pengurian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan

observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diketahui dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya.

Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman, dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan analisis data.

Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan langkah yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam

satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan beberapa metode tertentu.

2.1.1. Fungsi Analisis

Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
- b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
- c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

2.2. Tinjauan tentang Peranan

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut:

“Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan.”

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

Menurut Selo Sumarjono, peran (role) adalah aspek dinamis dari kehidupan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
2. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya;

3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran di antaranya sebagai berikut:

1. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002; Soekanto 1984: 237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Ketentuan peranan
- b. Gambaran peranan
- c. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara

aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto (1984) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan

didokumentasikan adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess)
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (1983 : 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa "suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang

teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha (1997 : 80) “Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“.Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas.Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto(1969 : 14) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Menurut Soekanto (1990 : 268) mendefenisikan peranan :

“....Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan....”

Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan

dan kedudukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain :

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku,
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah

dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Sementara Samuel Edwird Finer (dalam Inu Kencana Syafii'e, 2001:46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, menthod, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang

melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbale balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

1. **Pemerintah dalam arti sempit** yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
2. **Pemerintah dalam arti luas** adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility* (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)".

3. **Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat**, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
4. **Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah**. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Samuel Edward Finer (Syafi'ie 2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Bintoro Tjokroaminoto dalam bukunya pengantar ilmu Administrasi Pembangunan (1985: 17 dalam Syafi'ie 2004: 6-7) menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut:

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal :

“Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan ini didukung oleh filsafat

kemasyarakatan Laissez Faire. Namun, ada pula Negara filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandate untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah”.

Negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi Negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberrian kekuasaan dan kewenangan;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Selain itu beberapa ahli mencoba memberikan pandangan mengenai makna dari asas desentralisasi.

Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan ini sesuai dengan Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Sekigman, dan *Van Den Berg* yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah. Sementara *De*

Ruiter berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan atau wewenang ini terjadi bukan pada pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal yakni:

1. Kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain;
2. Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut;
3. Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu, serta;
4. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah disertai kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan itu dari tempatnya.

Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan *Logemann* dan *Litvack* bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi *Litvack* lebih jauh memaknai pelimpahan karena juga bisa kepada sektor swasta. Sementara Ateng menjadikan saran dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi.

Berbeda dengan *G Shabbir Cheema*, *John R Nellis*, dan *Dennis A Rondinelli* memandang bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu berkisar pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut *Gie* bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah.

Ketiga, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi dalam system pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, pemberian kekuasaan, dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh *Duchacek*, *Maryanov*, dan *Mawhood*, bahwa masalah desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan. Di sisi lain, *Tresna* berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri

kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan Negara.

Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat dari pandangan *Aldefer* yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pandangan pakar di atas dengan jelas menafsirkan bahwa makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka

melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4. Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut Hasan (1995) dalam Ahmadi (1990: 8) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pengertian sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Berdasarkan pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi

yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;
- 2) Menciptakan pola daya pikir yang sama;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang lebih baik; dan
- 4) Membina masyarakat daerah setempat.

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan, bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempatan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik selaras dengan dunianya.

Pendidikan yang kita inginkan saat ini ialah pendidikan pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota

merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk diberdayakan.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Menurut Amin Duien Indra Kusuma, pengertian pendidikan itu harus terkandung hal-hal yang pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan itu tidak lain adalah merupakan suatu usaha dari manusia;
2. Bahwa itu dilakukan dengan sengaja atau sadar;
3. Bahwa usahanya itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa bertanggung jawab kepada hari depan anak didiknya.
4. Bahwa usahanya berupa bantuan untuk bimbingan rohani dan dilakukan secara teratur dan sistematis;

5. Bahwa yang menjadi objek pendidikan itu adalah anak/ peserta didik yang masih dalam pertumbuhan/perkembangan atau memerlukan pendidikan;
6. Bahwa batas/sasaran akhir pendidikan adalah tingkat dewasa atau kedewasaan.

H.G Wells menyatakan bahwa pendidikan itu penting, tanpa pendidikan, bangsa yang bersangkutan akan hancur sedangkan dengan mengutamakan pendidikan bangsa yang bersangkutan akan jaya. Maka isi dan esensi dari pernyataan tersebut adalah betapa pentingnya masalah pendidikan itu, sering dikatakan pendidikan bersifat strategis, artinya dalam posisi suatu Negara dan bangsa, masalah pendidikan adalah masalah yang menentukan berhasil tidaknya bangsa tersebut dalam perjuangan.

Menurut S. P Siagian bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka menggalakkan sesuatu ilmu yang telah ditetapkan selamanya.

Menurut Dj. Drijakarya, Sj, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Jadi pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategis dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang istem Pendidikan nasional, semakin jelas bahwa pengertian pendidikan di

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun prinsip penyelenggaraan

pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun, kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Selain itu pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

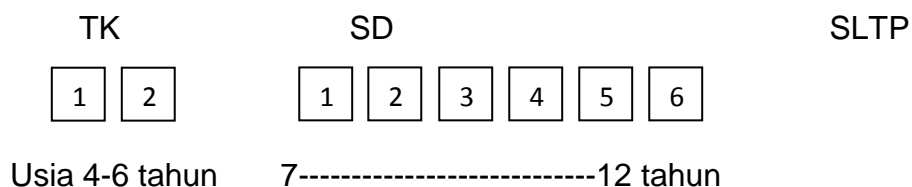
Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu dapat didalam pendidikan prasekolah yang tidak merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk ,masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga Negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

Gambar 1



b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya

dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

2.5. Tinjauan tentang Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (*MC Millen Kaufman*, dan *Whitener*, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

Ary H. Gunawan (2010: 71) menyatakan bahwa “putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari sekolah menurut S. Nasution antara lain:

1. Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang banyak menentukan pekerjaan yang dilakukannya oleh seseorang.

2. Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolah setidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern seperti saat ini. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa,

dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia dan perkembangan zaman.

3. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga orang tua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya.

4. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam mengelola kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia dianggap sumber utama bagi setiap pembangunan.

5. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, merusak lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkoba dan sebagainya.

6. Sekolah Membentuk Manusia Yang Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-bangsa, pendirian, dan sebagainya. ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda.

Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya kedalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya.

7. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan

Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini.

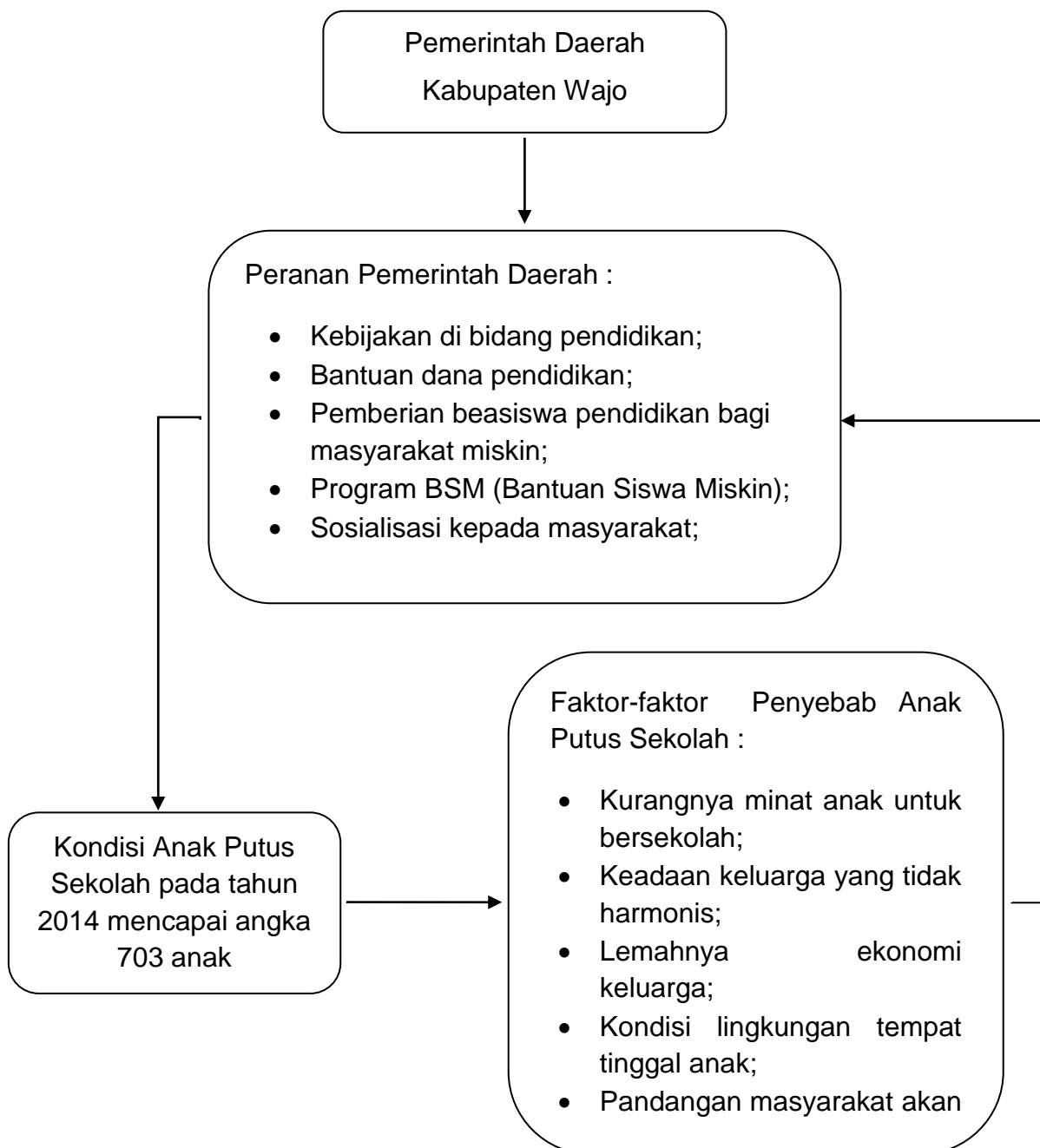
8. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya

Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak, khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik diawasi daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya mereka mendapat pekerjaan. Bagi mahasiswa sekolah juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan jodoh

2.6. Kerangka Konseptual

Secara jelasnya untuk melihat bagaimana alur penelitian dan penulisan dapat tergambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Wajo, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dan dari masyarakat, dengan pertimbangan bahwa komponen-komponen tersebut berperan penting dalam permasalahan yang diteliti.

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian

- a. *Tipe penelitian* yang digunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.
- b. *Dasar penelitian* adalah pendekatan studi kasus, artinya penulis akan meneliti satu unit sosial yang berkaitan dengan fokus permasalahan secara lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada dinamis dan kompleks.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
 - a) **Observasi** yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - b) **Interview** yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari dokumentasi maupun studi pustaka. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
 - a. **Dokumentasi** yang dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian

- b. **Studi pustaka** merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Sabbangparu.

4. Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Sabbangparu.
5. Masyarakat Kabupaten Wajo.

Dalam penelitian, selanjutnya dilapangan memungkinkan informan bertambah (*snowball sampling*) disebabkan informan tersebut dapat memberikan informasi mengenai data penulisan yang dibutuhkan.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.6. Definisi Operasional

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh, maka definisi konsep yang ada dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat

diuji kebenarannya. Adapun operasionalisasi konsep dalam penulisan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah

Peranan pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah dan pengambil kebijakan yang ada di daerah Kabupaten Wajo terhadap anak putus sekolah.

Hal ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan menekan angka anak putus sekolah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun Keputusan Bupati Kabupaten Wajo;
- Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di setiap jenjangnya. Baik berupa bantuan finansial dan motivasi-motivasi dalam menekankan pada pentingnya proses pendidikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Wajo serta Dinas/Instansi yang terkait beserta pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Berdasarkan kasus anak putus sekolah yang ditemukan penulis di Kabupaten Wajo dengan mengambil example dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Sabbangparu .

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan masyarakat yang dimulai dari sebuah perkampungan masyarakat yang bernama *Lampulugnge* (kampung yang berada di dekat Danau Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi sebuah asal mula terbentuknya kerajaan *Cinnottabi'*.

Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang puteri mahkota kerajaan Luwu yang bernama *We Taddangpalie* terpaksa disingkirkan dari kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan menular. *We Taddangpalie* dihanyutkan bersama

dengan para pengawalnya sampai akhirnya mereka terdampar di daerah maradeka (merdeka) yang disebut *Cinnottabi*. Puteri tersebut kemudian membangun rumah disebuah pohon kayu besar yang memiliki daun rindang, yang disebut dengan pohon *Bajo* dan dari nama pohon inilah muncul asal mula nama Wajo.

Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari *Tellu Kajurue* berinisiatif untuk mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul dibawah pohon *Bajo* untuk membicarakan masalah pengangkatan Raja yang akan memimpin ketiga negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga, raja tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat berdasarkan, yaitu adat dan hukum adat yang lahir dari persetujuan bersamaantara raja, penguasa adat dan rakyat (Indar Arifin: 206)

Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa *La Tenribali* (Arung Mataesso) yang juga sepupu dari raja-raja *Tellu Kajurue* yang diangkat menjadi Raja Wajo dan mendapatkan gelar *Batara Wajo* sebab beliau dalam hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis.

4.1.1. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak

diantara: $3^{\circ}39'$ – $4^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan diantara $119^{\circ}53'$ – $120^{\circ}27'$ Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat dengan luas wilayah Kabupaten Wajo adalah $2.506,19 \text{ km}^2$ atau 4,01% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Wajo berbatasan dengan daerah lain, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah timur berbatasan Teluk Bone;
- Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah barat berbatasan Kabuapten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Secara administratif, Kabupaten Wajo terbagi atas 14 Wilayah Kecamatan yang kemudian terbagi lagi menjadi 48 wilayah berstatus Kelurahan, dan 128 wilayah berstatus Desa, dengan ibu kota Kabupaten di Sengkang yang terletak di Kecamatan Tempe. Masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, meskipun perbedaan itu relatif kecil sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

Tabel 4.1.

Luas wilayah Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1	Sabbangparu	132.75	5.3
2	Tempe	38.27	1.53
3	Pammana	162.10	6.47
4	Bola	220.13	8.78
5	Takkalalla	179.76	7.17
6	Sajoanging	167.01	6.66
7	Penrang	154.90	6.18
8	Majauleng	225.92	9.01
9	Tanasitolo	154.60	6.17
10	Belawa	172.30	6.88
11	Maniangpajo	175.96	7.02
12	Gilireng	147.00	5.87
13	Keera	368.36	14.70
14	Pitumpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		2.506.19	100

Sumber : BPS Kabupaten Wajo 2014

Di dalam khasanah Lontara Wajo, karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terletak dengan posisi "Mangkalungu Ribulue, Massulappe Ripottanangnge, Mattodang Ritasie/Tappareng", yang artinya Kabupaten Wajo memiliki 3 (tiga) dimensi lahan, yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung, utamanya di Kecamatan Maniangepajo dan Kecamatan Pitumpanua, sebagai wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta pengembangan ternak;
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur, terbentang sepanjang 203 km garis pantai sebagai wilayah potensial untuk pengembangan perikanan & budidaya tambak.

4.1.2. Kependudukan

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Wajo tahun 2014 adalah sebanyak 394.789 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 188.250 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 206.539 jiwa. Berdasarkan data penduduk di publikasi ini, sex rasio penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2014 sebesar 91,15 % dan rata-rata

laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2009 hingga 2014 sebesar 0,8 %.
Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 157 jiwa/km² dan hampir 99,13 % beragama Islam.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1	Sabbangparu	12,079	14,138	26,217	85.44
2	Tempe	29,254	31,908	61,162	91.68
3	Pammana	14,966	16,694	31,660	89.65
4	Bola	9,416	10,386	19,802	90.66
5	Takkalalla	10,134	11,188	21,322	90.58
6	Sajoanging	9,291	9,784	19,075	94.96
7	Penrang	7,456	8,673	16,129	85.97
8	Majauleng	15,082	17,312	32,394	87.12
9	Tanasitolo	19,073	21,458	40,531	88.89
10	Belawa	15,405	17,080	32,485	90.19
11	Maniangpajo	7,874	8,473	16,347	92.93
12	Gilireng	5,582	5,928	11,510	94.16
13	Keera	11,335	11,576	22,911	97.92
14	Pitumpanua	21,303	21,941	43,244	97.09
Kabupaten Wajo		188,250	206,539	394,789	91.15

Sumber : BPS Kabupaten Wajo 2014

Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari tiga ratus ribu jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai untuk melaksanakan program pembangunan diberbagai aspek kehidupan, akan tetapi disisi lain dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah juga sekaligus merupakan sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

4.1.3. Kondisi Sosial Budaya

- **Pendidikan**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan maupun kedewasaan dalam berdemokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, dalam hal ini pendidikan adalah sebuah kunci kesuksesan sebuah daerah untuk memajukan daerahnya dengan adanya persaingan kulaitas dan mutu masyarakatnya di era sekarang ini. Ukuran keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari index pendidikan yang merupakan gabungan dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Tahun 2013, kondisi pendidikan Kabupaten Wajo memperlihatkan tren yang semakin membaik dibanding dengan kondisi-kondisi tahun yang lalu. Fakta tersebut digambarkan oleh indeks pendidikan. Namun bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan terlihat

bahwa indeks pendidikan Kabupaten Wajo relatif masih rendah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wajo Bidang Pendidikan

No.	Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Melek Huruf	81.68	81.97	82.69	83.53	84.97	84.99
2.	Rata-rata lama sekolah	6.00	5.80	6.06	6.22	6.51	6.60
3.	Indeks Pendidikan	67.79	67.54	68.59	69.51	71.11	71.32

Sumber: BPS Kab.Wajo

Dalam periode 2008-2013, jumlah yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang meningkat dari 81,68 pada tahun 2008 menjadi 84,99 pada tahun 2013. Namun demikian, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, 84,50 tahun 2009 menjadi 86,24 tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten Wajo masih relatif rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wajo pada tahun 2013 adalah 6 tahun. Artinya, pada tahun 2013 setiap penduduk mempunyai jenjang pendidikan sekolah dasar dan sedang duduk di kelas 6. Angka ini telah meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun meningkat, angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Kesehatan**

Upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan, antara lain penyuluhan dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti; puskesmas, posyandu, pustu, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Upaya tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan peran aktif terutama pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau masyarakat. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2014 terdapat 23 Puskesmas, 54 Puskesmas pembantu, 95 buah Polindes, 3 buah Rumah Sakit, 64 buah Praktek Dokter dan 44 Praktek Bidan, 21 Apotik.

Walaupun puskesmas terdapat hampir semua Kecamatan, namun kualitas pelayanan sebagian besar Puskesmas dan RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan di Bidang Kesehatan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, masih tingginya penyebaran penyakit menular dan penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat dalam menjangkau biaya kesehatan serta perlunya penyebaran tenaga medis sesuai kebutuhan penduduk.

Kualitas kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana masyarakat tinggal. Permasalahannya, kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup masih diperlukan ditingkatkan dalam hal berwawasan lingkungan hidup yang sehat guna mencegah adanya wabah penyakit menular atau kejadian luar biasa (KLB) wabah penyakit. Pengaruh aktivitas masyarakat sehari-hari terhadap lingkungan memang baru dirasakan setelah beberapa tahun berjalan. Pengaruh yang tidak langsung inilah yang membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya memelihara lingkungan. Dalam hal penanganan sampah, masyarakat masih mengaggap bahwa pemerintah melalui Dinas Kebersihan adalah pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, kedepannya perlu sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan masalah sampah.

- **Perkembangan PDRB**

Potensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki Kabupaten Wajo terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 , nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan sekitar 7,11% dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2013, sedangkan untuk nilai PDRB atas harga konstan tahun 2000, juga mengalami peningkatan sebesar 3,72%.

Ukuran secara makro mengenai kemakmuran penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh perolehan PDRB perkapita yang ada di wilayah itu. Pada tahun 2014, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo telah mencapai Rp 22,892 juta rupiah atau dengan nilai konstan 2000 sebesar Rp 8,166 juta rupiah.

- **Kondisi Politik dan Keamanan**

Kondisi politik dan keamanan di daerah Kabupaten Wajo sifatnya dinamis dan terbuka. Hal ini sinergis dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokratis yang memberikan kebebasan rakyatnya dalam artian kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut diperkuat dengan partisipasi

masyarakat terhadap kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Bupati.

Pada kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo termasuk suatu daerah yang tidak memiliki potensi konflik yang besar. Hal ini disebabkan karakter masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada setiap kontes pemilihan pimpinan.

Kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo tersebut dapat dilihat pada partisipasi penduduk di PEMILUKADA (pemilihan Bupati Wajo) yang dimana menjalankan proses dengan sangat demokratis tanpa adanya kerusuhan atau konflik pada masyarakat.

- **Potensi-potensi daerah**

Potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Wajo adalah Wisata Alam Danau Tempe dan Agrowisata Sutera. Disamping itu, juga terdapat lokasi-lokasi wisata yang lain baik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Setiap tahun dilaksanakan acara Festival Danau Tempe dirangkaikan dengan ritual Maccera Tappareng (mensucikan danau) yang dapat menjadi tontonan wisatawan dan mancanegara,

Kabupaten Wajo dikenal sebagai salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Bahkan beras dari Kabupaten Wajo didistribusikan keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan beras daerah tetangga seperti kalimantan dan sebagainya. Produksi beras Kabupaten Wajo pada tahun

2014 adalah 677.097 Ton dengan luas panen 128.435 Ha dari luas lahan keseluruhan adalah 145.398 Ha, dengan produktivitas 5,272 ton/ha. 60% lahan masih merupakan lahan tadah hujan, selebihnya adalah sawah pompanisasi, pengairan teknis dan setengah teknis, sehingga dibutuhkan investasi dibidang ini.

Panjang garis pantai Kabupaten Wajo adalah 103 Km yang meliputi enam Kecamatan, sehingga sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan laut. **Potensi Perikanan Laut** Kabupaten Wajo memiliki laut yang memiliki garis pantainya sepanjang 103 Km yang meliputi enam kecamatan. Panjang garis pantai ini sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan laut. Penangkapan ikan pada umumnya masih menggunakan sistem tradisional sehingga input teknologi penangkapan berupa sarana pendukung dan peralatan alat tangkap modern sangat dibutuhkan. Selain itu investasi pendirian Pabrik Es juga diperlukan dalam penyediaan Es untuk penanganan hasil tangkapan. Berdasarkan data Tahun 2014 produksi perikanan laut mencapai 10.451 ton.

Selain potensi-potensi yang disebutkan diatas, Sengkang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sejak dulu juga dikenal sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang elektronik, kain dan kain sarung bahkan kebutuhan pokok lainnya konon

memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Sengkang menjadi salah satu kota dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan.

Disamping dikenal sebagai kota niaga, Sarung Sutra menjadikan ibukota Kabupaten Wajo semakin akrab ditelinga dan hati orang-orang yang pernah berkunjung ke kota ini, kelembutan dan kehalusan tenunan sarung sutera Sengkang sudah sedemikian dikenal bahkan hingga kemancanegara.

Hampir disetiap kecamatan di daerah ini ditemukan kegiatan persuteraan dimulai dari kegiatan proses hulu sampai ke hilir, kegiatan pemeliharaan ulat sutera hingga proses pemintalah menjadi benang yang kemudian ditenun menjadi selembur kain sutera.

Dalam bahasa lokal (Bugis) sutera disebut dengan "Sabbe", dimana dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain sarung sutera masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional yaitu alat tenun gedogan dengan berbagai macam motif yang diproduksi seperti motif "Balo Tettong" (bergaris atau tegak), motif ("Makkalu" (melingkar), motif "mallobang" (berkotak kosong), motif "Balo Renni" (berkotak kecil). Selain itu ada juga diproduksi dengan mengkombinasikan atau menyisipkan "Wennang Sau" (lusi) timbul serta motif "Bali Are" dengan sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain Damas.

Melihat Potensi perkembangan sutera di Wajo, pada tahun 1965 seorang tokoh perempuan yang juga seorang bangsawan "Ranreng Tua"

Wajo yaitu Datu Hj. Muddariyah Petta Balla'sari memprakarsai dan memperkenalkan alat tenun baru dari Thailand yang mampu memproduksi sutera asli (semacam Thai Silk) dalam skala besar. Mulai saat itulah perkembangan besar sutera di Kabupaten Wajo

- **Nilai**

Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Wajo diangkat dari nilai/budaya tradisional yang dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut secara global dan diterima secara luas oleh masyarakat. Nilai yang dituangkan disini bertolak pada dua bentuk yaitu:

1. Nilai sosial kemasyarakatan, yang bertolak pada kearifan budaya Wajo (Riassiwasjori) yang bertumpu pada 3 (tiga) nilai-nilai :

- a. **Sipakatau**

Nilai ini mensyaratkan agar dalam membina interkoneksi, sebagai elemen utama dalam wacana kemandirian lokal, seyogyanya dilaksanakan berdasar prinsip kebersamaan yang berbasis pada penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok masyarakat.

- b. **Sipakalebbi**

Nilai ini mensyaratkan agar dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh pergaulan, termasuk melaksanakan aktifitas pembangunan dibutuhkan saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan

peran masing-masing dalam rangka mensejahterakan dan menjaga kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

c. Sipakainge

Nilai ini mengedepankan rasa saling mengingatkan dan saling menunjukkan jalan terbaik yang akan ditempuh dalam mewujudkan suatu cita-cita bersama, melakukan koreksi dan saran konstruktif untuk penyelesaian setiap dan menjauhi rasa curiga dan sentimen yang dapat merusak hubungan kemanusiaan, sekaligus merupakan kiat mempertemukan aspirasi sebagai basis dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Nilai Religius /Ketuhanan yaitu : Resopa Natinulu, Temmaginggi Malomo Naletei Pammase Dewata.

4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Wajo

Visi : “Menjadikan Kabupaten Wajo Sebagai Salah Satu Kabupaten Terbaik di Sulawesi Selatan Dalam Pelayanan Hak Dasar Masyarakat Dan Tata Pemerintahan yang Profesional”

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. “*Salah Satu Kabupaten Terbaik*” yang dimaksud adalah posisi relatif yang idealnya dicapai secara regional oleh Kabupaten Wajo pada tahun 2013, dan terukur melalui indikator pemenuhan hak

dasar masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

- b. *“Tata Pemerintahan yang Profesional”* adalah penataan pemerintahan yang berfokus pada upaya untuk menciptakan aparatur yang cakap dan inovatif baik sebagai birokrat dan pelayan masyarakat dan sebagai wujud pemerintahan yang kelembagaannya kuat, efisien dan efektif dalam berfungsi serta amanah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. *“Pelayanan Hak Dasar Masyarakat”* adalah upaya peningkatan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Hak dasar yang diprioritaskan adalah hak atas layanan dan peningkatan pendidikan, hak atas layanan kesehatan dan hak untuk bekerja dan berusaha. Hak dasar adalah substansi dari kontrak sosial dari kepala daerah yang terpilih yang diwujudkan dalam pemerintahannya kepada rakyat. Upaya hak dasar masyarakat ini juga akan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya perbaikan dalam aspek pemenuhan hak dasar masyarakat akan menjadi fokus dan prioritas bidang peningkatan yang akan diwujudkan dalam misi Kabupaten Wajo selama lima tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembanguna Kabupaten Wajo, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. *Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat.* Misi ini bertujuan mewujudkan kondisi yang aman dan damai, religius dan inovatif sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa kendala faktor keamanan.
2. *Menguatkan lembaga dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.* Misi ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab (profesional), taat asas (Peraturan dan perundang-undangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi.
3. *Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis ekonomi kerakyatan.* Misi ketiga ini bertujuan agar tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Wajo dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, diiringi dengan upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu kepada sektor unggulan lainnya, menuju masyarakat berkualitas, maju dan mandiri, dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya
4. *Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.* Misi keempat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas.

4.1.5. Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo

Adapun susunan struktur pemerintah daerah Kabupaten Wajo terdiri atas:

- a. Bapak Drs. H. A. Burhanuddin Unru, MM. selaku Bupati Wajo
- b. Bapak Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE, M.Si selaku Wakil Bupati Wajo
- c. Bapak Ir. Andi Maddukelleng selaku Sekretaris Daerah Kab. Wajo

- **Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan
 4. Bagian Administrasi Kerjasama Antar Daerah
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
 1. Bagian Administrasi Pengembangan Potensi Daerah
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
 4. Bagian Administrasi Perekonomian

d. Asisten Administrasi Umum :

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
3. Bagian Umum
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

• **Daftar Nama Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo**

Tabel 4.4.

Daftar Nama Dinas Di Kabupaten Wajo

NO.	NAMA DINAS	ALAMAT
1.	Dinas Pendidikan (Kepala Dinas : Drs.Jasman Juanda,M.Si)	JL. Jend. Ahmad Yani No. 27 Sengkang
2.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kepala Dinas : Dra.Dahniar Gaffar)	JL. Jend. Ahmad Yani No. 37 Sengkang
3.	Dinas Kesehatan (Kepala Dinas : dr.Abdul Asis)	JL. Jend. Ahmad Yani No. 31 Sengkang
4.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepala Dinas : Drs.Andi Tenriliweng,M.Si)	JL. Bau Baharuddin No. 11 Sengkang
5.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kepala Dinas : Drs.H.A.Djunaedi Hafid)	JL. Sawerigading No. ... Sengkang
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kepala Dinas : Abdul Gaffar,SH,MM)	JL. Bau Mahmud No.
7.	Dinas Pekerjaan Umum (Kepala Dinas : H.Bustamin Betta,SH)	JL. A. Pawellangi KM 8 Ujunge Sengkang
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, & Perindustrian (Kepala Dinas : Drs.H.A.Ampa Passamula)	JL. Bau Baharuddin No. 4 Sengkang
9.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Holtikultura	JL. Lamaddukelleng No. 1 Sengkang

	(Kepala Dinas : drh.Putu Arthana)	
10.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kepala Dinas : Ir. Darwin Tjukke)	JL. Veteran No. 33 Sengkang
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Kepala Dinas : Muh.Natsir)	JL. Budi Utomo No. 9 Sengkang
12.	Dinas Tata Ruang, Pemukiman & Kebersihan (Kepala Dinas : Drs.H.Muh.Nasir,MM)	JL. Lamaddukelleng No. 1 Sengkang
13.	Dinas Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah (Ir.Armayani)	JL. Rusa No. 17 Sengkang
14.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepala Dinas : Ir.Firmansyah Perkesi,M.Si)	JL. Bau Baharuddin No. 86 Sengkang

Sumber : BPS Kab.Wajo 2014

- **Daftar Nama Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Wajo**

Tabel 4.5.

Daftar Nama Lembaga Teknis Kabupaten Wajo

NO.	NAMA LEMBAGA TEKNIS	ALAMAT
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Kepala : Drs.H.A.Muslihini,MP)	JL. Lontar No. 1 Sengkang
2.	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (Kepala : Drs.H.Jamaluddin)	JL. Kejaksaan No. 5B Sengkang
3.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kepala : Dra.A.Lilianna Nasrullah)	JL. Veteran No. 35 Sengkang
4.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Kepala : Ir.Nasfari)	JL. Lamaddukelleng No. 1 Sengkang
5.	Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kepala : Dra.A. Ratnawati Paturusi)	JL. Kejaksaan No. ... Sengkang
6.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kepala : Drs.H.Thamrin Mochtar)	JL. Lontar No. 2B Sengkang
7.	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga	JL. Beringin No. 5

	Sejahtera (Kepala : dr.Sri Relati Rejeki)	Sengkang
8.	Badan Pengawas Daerah (Kepala : Drs.Sudirman Remmang)	JL. Kejaksaan No. 3 Sengkang
9.	Rumah Sakit Umum Daerah (Kepala : dr.Baso Rahmanuddin)	JL. Kartika Chandra Kirana No. 9 Sengkang
10.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Kepala : Drs.Zainuddin)	JL. Rusa No. 17 Sengkang
11.	Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat : Drs.H.A.Budi Agus)	JL. Rusa No. 17 Sengkang
12.	Kantor Pelayanan Terpadu (Kepala : Kosong)	JL. Rusa No. 17 Sengkang
13.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala : Dra.Irawati Perkesi,M.Si)	JL. Rusa No. 17 Sengkang

Sumber : BPS Kab. Wajo 2014

4.1.6. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

- Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo pada Bab III (tiga) Bagian Pertama Pasal 3 menyatakan bahwa: Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa: Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo pada Bab III (tiga) Bagian Kedua Pasal 5 menjelaskan tentang Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi

Dinas Pendidikan terdiri dari

- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Pendidikan Dasar :

1. Seksi Manajemen Pendidikan Dasar
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan:

1. Seksi Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah dan Kejuruan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan

e. Bidang Pendidikan Pra Sekolah :

1. Seksi Manajemen Pra Sekolah
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pra Sekolah
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah

f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah :

1. Seksi Manajemen Pendidikan Luar Sekolah
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. UPT

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- **Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Rutin SKPD;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program perencanaan dan pelaporan, kinerja dan keuangan.

b. Urusan Wajib Pendidikan:

1. Program pendidikan anak usia dini;
2. Program pendidikan non formal dan informal;
3. Program wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun ;
4. Program pendidikan menengah dan kejuruan;
5. Program pengkajian perencanaan pendidikan;

6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan;
7. Program manajemen pelayanan pendidikan

4.2. Peranan Pemerintah Daerah dalam menekan Angka Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar teknologi yang semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2013 dalam rangka menjamin

hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo tahun 2014 mencapai angka 703 anak.

“Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan”, jelas Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si saat diwawancarai di ruangnya Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47.

Kondisi anak putus sekolah di Kabupaten Wajo untuk empat tahun terakhir yakni 2011 sampai dengan 2014, akan digambarkan oleh tabel berikut :

Tabel 4.6
Kondisi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo

No.	Tingkat Pendidikan	Kondisi Anak Putus Sekolah Kabupaten Wajo			
		2011	2012	2013	2014
1.	SD	702	537	492	389
2.	SMP	241	264	238	145
3.	SMA	213	231	217	169
Jumlah		1.156	1.032	947	703

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Dari Tabel 4.6 menunjukkan kondisi anak putus sekolah setiap tahunnya mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anak putus sekolah setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun

2011 jumlah anak putus sekolah mencapai angka 1.156 anak, pada tahun 2012 berada pada angka 1.032 anak, tahun 2013 kembali mengalami penurunan yang berada pada angka 947 anak dan pada tahun 2014 berada pada angka 703 anak. Hal ini dapat membuktikan adanya penurunan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

- **Kebijakan di bidang pendidikan**

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Wajo yakni meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan, utamanya SD, SLTP dan SLTA seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Bupati Wajo, yang telah diberikan kepada setiap perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa, untuk kemudian disosialisaikan dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat akan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu informan, bahwa kebijakan di bidang pendidikan yakni gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Menurut Wakil Bupati Wajo Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE, M.Si., mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah dalam memenuhi hak dasar setiap masyarakat terus dimaksimalkan pada bidang pendidikan, salah satunya yakni penuntasan wajib belajar 12 tahun. Namun, meski pemerintah telah berupaya meringankan kebutuhan masyarakat, jika tidak dibarengi dengan tanggapan positif oleh masyarakat, maka hasilnya juga akan nihil. Hal ini dikarenakan masih adanya pemikiran masyarakat yang menilai pendidikan itu sangat mahal dan dengan pendidikan tidak menjamin kehidupan yang lebih layak”. (wawancara Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47)

Salah satu indikator mutu pendidikan dilihat dari aspek peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumlah anak yang tidak dan atau putus sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar mencapai 0%. Jika indikator ini menjadi kesepakatan, maka mesti ada upaya gerakan secara

kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau memerangi anak tidak dan atau putus sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, nampaknya permasalahan pendidikan telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Wajo. Hal ini berangkat dari visi misi pembangunan, yang menfokuskan pada peningkatan dan pelayanan pendidikan sebagai hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tak akan berarti tanpa adanya kesadaran oleh setiap masyarakat akan pentingnya pendidikan dan merupakan hak dan kebutuhan setiap orang untuk mengenyam pendidikan.

Pemerintah dan segenap warganya mesti bertanggung jawab terhadap pembangunan bidang pendidikan khususnya meminimalkan anak putus dan atau tidak sekolah. Jika penuntasan anak putus dan atau tidak sekolah diaktualisasikan menjadi gerakan bersama, maka diharapkan semua elemen dalam masyarakat akan menjadikan anak yang tidak dan atau putus sekolah menjadi tanggung jawab bersama dan menjadikannya sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan bersama oleh setiap elemen yang terkait.

- **Bantuan dana pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Wajo telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo yakni

penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan, dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada.

Untuk tahun 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) yang cukup besar ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yakni mencapai angka 36 Miliar lebih atau meningkat Rp.10 Miliar dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si, mengatakan:

*“Besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo, dimana hal tersebut telah menjadi Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Wajo dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak atas layanan dan peningkatan pendidikan”.
(wawancara Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47)*

Program tersebut tentunya sangat sesuai dengan arah kebijakan sektor pendidikan yang mengarah kepada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat akan pendidikan. Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membuat arah kebijakan pendidikan tersebut untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun

keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tanpa dipungut biaya.

Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Wajo ini jumlahnya terbilang sangat besar. Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo menyebutkan anggaran dana bos untuk kabupaten wajo sebesar Rp 36.938.970.000,-. Dana tersebut dialokasikan kepada siswa Sekolah Dasar yang berjumlah 41.635 siswa sedangkan Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 12.177 siswa, dengan rincian persisiwanya sebesar Rp. 800.000 untuk SD, dan untuk SMP sebesar Rp. 1.000.000 persiswa pertahunnya. Namun untuk tahun 2014, pemerintah daerah yang telah menjadikan program wajib belajar 12 tahun bagi Kabupaten Wajo dengan menganggarkan untuk SMA sebesar Rp. 1.500.000 untuk setiap siswa pertahunnya.

Secara khusus, anggaran dana BOS digunakan untuk:

- 1)Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga

sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. 2)Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, 3)Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Kabupaten Wajo sendiri memiliki Sekolah Dasar (SD/Sederajat) sebanyak 399 dengan jumlah siswa sebanyak 41. 635 siswa, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) sebanyak 74 sekolah, jumlah ini sudah termasuk sekolah terbuka dan sekolah satu atap dengan jumlah siswa sebanyak 12.177 siswa. Sementara penganggaran dana pendidikan Gratis demi mendukung peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten Wajo harus mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Wajo rata-rata sebesar Rp. 23 Milyar setiap tahunnya. Sementara pada tahun 2013 dan seterusnya Pemerintah Kabupaten Wajo juga akan menggratiskan hingga ke tingkat SMA/Sederajat dengan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 10 M.

Selain dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah daerah juga memberikan bantuan bagi siswa miskin di setiap sekolah dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan adanya bantuan-bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah biaya pendidikan yang menurut mereka mahal.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bersumber dari APBD yang ditransfer ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kesekolah. Adapun mekanisme penyaluran dana BOS bersifat fluktuasi. Artinya, kadang mengalami kenaikan, bahkan bisa mengalami penurunan.

- **Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin**

Diantara faktor-faktor penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, kiranya faktor ekonomi terkadang menjadi faktor yang paling sering ditemui. Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, maka optimalisasi pemberian beasiswa menjadi alternatif kebijakannya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si, yang mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Sekolah terkait telah mengoptimalkan dari segi pendataan siswa yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban orang tua dan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan”. (wawancara Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47)

- **Program BSM (Bantuan Siswa Miskin)**

Teridentifikasinya anak yang tidak dan atau putus sekolah baik karena faktor ekonomi dan jarak maka Program Bantuan Siswa Miskin menjadi alternatif lain selain optimalisasi beasiswa.

Program BSM merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di setiap daerah dengan maksud untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Wajo pada khususnya terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global. Program ini bertujuan :

1. Untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak;
2. Mencegah siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya;
3. Membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,;
4. Mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas); serta
5. Membantu kelancaran program sekolah.

Siswa Penerima BSM ini berasal dari keluarga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang memiliki anak usia sekolah. Dana BSM yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi melalui mekanisme transfer langsung ke rekening siswa dari bank pelaksana yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan

berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

- **Sosialisasi kepada masyarakat**

Selain mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Kondisi anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atasi melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga

dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tetapi dapat hidup layak.

Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah melakukan kampanye pendidikan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa berupa sosialisasi dan penyediaan taman baca di setiap kelurahan/desa dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis terutama di bidang pemerataan dan perluasan akses, misalnya subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan yakni

bersekolah melalui program-program yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu masih mahal bagi mereka yang perekonomian lemah dan hidup berkekurangan serta anggapan bahwa orang yang sekolah nantinya akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dianggap menjadi orang yang sukses. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam upaya mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.

Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo diatas, dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo, menurut penulis kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Pemerintah Kabupaten Wajo dengan berbagai program pendukungnya yang belum terealisasikan secara optimal, hal ini terjadi karena masih adanya kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Wajo. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kecamatan maupun Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak

untuk peningkatan kualitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di setiap sekolah, perlu adanya peningkatan pengawasan dari tim Pengawas yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam melihat laporan penggunaan dana BOS oleh setiap Sekolah dan mencocokkan dengan apa yang ada di lapangan, sehingga penggunaan dana BOS itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan dana BOS itu sendiri tidak terdapat penyalahgunaan. Seperti pada kasus penyelewengan Dana BOS dan dana gratis di SDN 236 Mattirotappareng, Kecamatan Tempe yang dilaporkan oleh salah satu pihak guru dari sekolah tersebut. Pada pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis dana BOS. Dari laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan oleh kepala sekolah terkait penggunaan dana tersebut diduga fiktif, seperti pembelian seragam untuk siswa yang tak satupun siswa mendapatkan seragam sekolah yang dimaksudkan. Serta pada kasus penyelewengan Dana BOS yang terjadi di SDN 228 Benteng Lompo, Kecamatan Sabbangparu. Dimana dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah dalam hal ini bendahara pada tahun 2013 baru menerima RP 5,5 juta dari Rp 14 juta lebih yang diterima sekolah, sedangkan sisanya dikelola oleh Kepala Sekolah. Dari kasus ini pihak Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD)

Pendidikan Kecamatan Sabbangparu membenarkan adanya penyelewengan Dana BOS dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sekolah terkait dikarenakan sesuai dengan aturan seharusnya dana BOS dipegang oleh bendahara sekolah, bukannya kepala sekolah.

Selain itu, dalam pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan bantuan siswa miskin (BSM) harus dilakukan pendataan yang obyektif bagi setiap masyarakat yang seharusnya dan selayaknya menerima dan di berikan secara merata bagi setiap masyarakat. Pendataan yang belum merata dialami oleh salah satu keluarga yang ada di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, yakni keluarga dari ibu Nurmiati yang anak pertamanya mengalami putus sekolah sedangkan anak kedua dan ketiganya yang sementara mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar, namun hanya salah satu anaknya yang terdata untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin dari dua anaknya yang duduk di bangku Sekolah Dasar, jelas Ibu Nurmiati yang pada saat itu juga diwawancarai mengenai anaknya yang putus sekolah (Sabtu 21 Februari 2015, pukul 13:29). Jadi menurut penulis Pemerintah Kabupaten Wajo yakni Dinas Pendidikan dan setiap elemen terkait agar melakukan pendataan yang obyektif serta merata bagi masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan tersebut demi mengurangi beban orang tua untuk menjamin hak dasar setiap anak untuk bersekolah dan hak masyarakat akan pendidikan.

Serta dalam pembangunan taman baca pada akhir tahun 2014 yang dilaksanakan di setiap balai desa yang bertujuan sebagai wadah dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu, harus dilaksanakan secara merata demi pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo.

4.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah. Menurut Wakil Bupati Wajo Dr. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE, M.Si, bahwa:

*“Bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas masyarakat di bidang pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tentunya sebagai daya saing masyarakat di era sekarang ini”.
(wawancara Selasa 24 Februari 2015, pukul 10:32)*

Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasi secara maksimal disebabkan karena masih adanya kondisi anak putus sekolah Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

“Tahun 2014, data anak putus sekolah mencapai angka 703 anak, hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan”, jelas Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Drs. Jasman Juanda, M.Si saat diwawancarai di ruangannya Senin 2 Maret 2015, pukul 12:47.

Berikut ini data perbandingan anak putus sekolah dengan anak sekolah yang ada di Kabupaten Wajo:

Tabel 4.7

Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo

Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah		
			Anak Putus Sekolah	Anak Sekolah	Sekolah
1	SD / Sederajat	6-11 / 7-12	389	41.635	399
2	SMP / Sederajat	11-14 / 12-15	145	12.177	74
3	SMA / Sederajat	14-17 / 15-18	169	10.296	32
Jumlah			703	64.108	505

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Berdasarkan tabel 4.7 angka anak putus sekolah terjadi pada pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 389 anak dan anak yang sekolah sebesar 41.635 anak. Kemudian pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak putus sekolah mencapai angka 145 anak dan anak yang

sekolah sebesar 12.177 anak. Dan anak putus sekolah pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) mencapai angka 169 anak, sedangkan anak sekolah sebesar 10.296 anak. Jumlah anak putus sekolah untuk tahun 2014 mencapai 703 anak. Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ketahun. Keadaan sarana dan prasarana yakni jumlah sekolah di setiap tingkat pendidikannya sekiranya sangat memadai, namun kondisi anak putus sekolah dapat disebabkan karena beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Berikut ini Data Anak Putus Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin yang ada Di Kabupaten Wajo :

Tabel 4.8

Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo
Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	214	175	389
2	SMP	70	75	145
3	SMA	96	73	169
Total		380	323	703

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada tingkat SD, kondisi anak putus sekolah mencapai angka 214 untuk anak laki-laki dan 175 untuk anak perempuan. Tingkat SMP menunjukkan kondisi anak putus sekolah

mencapai angka 70 untuk anak laki-laki dan 75 untuk anak perempuan dan kondisi anak putus sekolah pada tingkat SMA anak laki-laki mencapai angka 96 dan anak perempuan mencapai angka 73. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Wajo didominasi oleh anak laki-laki, kecuali di tingkat SMP yang didominasi oleh anak perempuan

Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah yang wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak seperti lingkungan dan sebagainya. Berikut ini penulis akan memaparkan kasus mengenai kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo:

Pertama, kasus yang terjadi di SDN 14 Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam hal ini Ibu Hj. Wati S.Pd selaku kepala sekolah SDN 14 Lapongkoda (Selasa 17 Februari 2015, Pukul 09:38 WITA). Penulis mengetahui bahwa bahwa terdapat seorang anak yang putus sekolah, yakni siswa kelas 5 atas nama Kadir Panrita disebabkan minat anak untuk bersekolah yang tiba-tiba hilang. Dari apa yang diketahui pihak sekolah, hal dikarenakan perceraian kedua orang tuanya yang berdampak pada psikologi sang anak dimana tingkah lakunya disekolah mulai berubah seperti tiba-tiba sering mengganggu

temannya atau membuat onar disekolah serta malas untuk kesekolah dan akhirnya minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi. “Pihak sekolah yang telah berusaha menghubungi orang tua dalam hal ini ibu dari Kadir Panrita agar anaknya dapat kembali bersekolah seperti teman sebayahnya, namun tidak mendapat respon apapun dari ibu Kadir Panrita”, jelas Ibu Hj. Wati S.Pd saat diwawancarai.

Kedua, kasus yang terjadi di Desa Piampo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tepatnya di SDN 201 Wewangrewu. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Muh Yusuf S.pd selaku Kepala Sekolah (Rabu 19 Februari 2015, pukul 10.45), penulis mengetahui bahwa di SDN 201 Wewangrewu terdapat satu anak yang DO (*Drop Out*) atau putus sekolah di kelas IV (empat). Anak yang DO (*Drop Out*) pada kelas IV (empat) atas nama Ari Wardana dikarenakan minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi yang awalnya anak tersebut sering membolos sekolah yang kemudian anak tidak ingin lagi untuk bersekolah seperti selayaknya anak seusianya atau teman sebayahnya yang harusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar.

Ketiga, kasus yang terjadi di Desa Salomenraleng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tepatnya yang terjadi pada keluarga Bapak Muh. Nure dan Ibu Suarni yang memiliki 5 orang anak (3 laki-laki dan 2 perempuan) dimana anak pertama dan keduanya hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, anak ketiganya tidak menyelesaikan

pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar dan 2 anak perempuannya sementara mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Saat diwawancarai pada Rabu 18 Februari 2015/Pukul 10.25, Ibu Suarni menjelaskan bahwa anaknya yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan salah satu anaknya terpaksa berhenti sekolah dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga, dimana suaminya yang hanya bekerja sebagai nelayan di Danau Tempe dengan penghasilan yang tidak tetap serta keadaan suaminya yang tidak sesehat dulu lagi untuk lebih sering turun menangkap ikan, sehingga tiga anak laki-lakinya lebih memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan mereka.

Keempat, kasus yang terjadi di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini terdapat beberapa keluarga yang anaknya putus sekolah. Salah satunya terjadi pada Muhammad Akbar anak pertama dari 4 bersaudara dari Bapak Ramli dan Ibu Nurmiati yang mengenyam pendidikan di SMPN 3 Sengkang, saat diwawancarai (Sabtu 21 Februari 2015, pukul 13:29) ibu Nurmiati menjelaskan hal ini dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya dimana anaknya sehari-harinya bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya yang menyebabkan dia sering membolos sekolah serta terpengaruh dengan gaya hidup temannya yang merokok dan sering mengonsumsi minuman

beralkohol, sehingga lama-kelamaan berdampak pada keinginan anak untuk tidak bersekolah lagi.

Kelima, kasus anak putus sekolah yang terjadi di Desa Wiringpalennae ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki anak putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga bapak Amir dan Ibu Hasnani yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dimana anak pertama dan kedua hanya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, sedangkan anak ketiganya yang sementara mengenyam pendidikan di kelas 7 SMPN SATAP 8 Wiringpalennae terpaksa berhenti. Saat diwawancarai pada pukul 11.35 / Rabu, 25 Februari 2015, ibu Hasnani mengaku bahwa anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena dia kurang mempunyai dalam hal biaya. Walau pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan seperti dana BOS, beasiswa bagi keluarga miskin para orang tua mengeluh akan tingginya pembiayaan yang terkait dengan aspek biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka seperti biaya untuk kebutuhan pribadi anak yang bersekolah seperti baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan tambahan uang jajan pada saat anak-anaknya bersekolah. Apalagi pekerjaan suaminya yang hanya sebagai buruh pengangkut semen dengan penghasilan Rp. 50.000,- per harinya dirasa pas-pasan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya dan ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan atau keperluan sekolah anak-anaknya. Selain itu setelah tamat dari sekolah, anak-

anaknya belum tentu bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan yang tetap ataupun lebih layak.

Maka dari itu anak-anaknya lebih memilih untuk bekerja sebagai kulih bangunan untuk menghasilkan uang dari pada melanjutkan sekolahnya. Hal ini tentunya dapat meringankan beban orang tuanya serta dapat menambah penghasilan dan mengatasi kesulitan biaya hidup keluarganya.

Keenam, kasus yang terjadi di Desa Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Tepatnya di SMAN 1 Sabbangparu. Berdasarkan wawancara langsung dengan bagian kesiswaan, yakni ibu Andi Meriyani S.Pd (Kamis 26 Februari 2015, pukul 10:46) menjelaskan bahwa di SMAN 1 Sabbangparu terdapat beberapa anak putus sekolah pada kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas). Dari pihak sekolah dalam mekanisme untuk menetapkan seorang anak DO (*Drop Out*) atau berhenti dari sekolah harus dengan pernyataan dari sang anak yang diketahui oleh orang tuanya dan dengan alasan apa hingga berhenti bersekolah demi mewujudkan program pendidikan anak usia sekolah hingga jenjang Sekolah Menengah Atas bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Wajo. Pertama pihak sekolah biasa menyurati orang tua siswa, kemudian disusul surat pemanggilan kepada orang tua siswa. Jika hal tersebut dihiraukan, barulah pihak sekolah melakukan kunjungan kerumah orang tua siswa untuk mengetahui kenapa anak tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan.

“Dari kasus pada kelas X (sepuluh) terdapat 9 anak yang berhenti sekolah. Beberapa dikarenakan keinginan mereka sendiri, atau bisa dikatakan minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi dan sebagian anak lainnya yang berhenti bersekolah di SMAN 1 Sabbangparu disebabkan anak-anak lebih memilih bekerja menjadi buruh penggiling beras (ma’deros), karena dianggap mereka bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus membuang-buang waktu dengan mengenyam pendidikan di bangku sekolah sedangkan kasus di kelas XI (sebelas) terdapat 2 anak yang berhenti sekolah karena keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang sementara masing mengenyam pendidikan seperti teman sebayahnya ataupun anak seusia mereka”, jelas ibu Andi Meriyani S.Pd saat diwawancarai.

Berdasarkan dari beberapa kasus anak putus sekolah di Kabupaten Wajo yang dilampirkan oleh penulis dengan mengambil example di tiga Kecamatan (Kec. Tempe, Kec. Tanasitolo, Kec. Sabbangparu), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi anak putus sekolah, yakni:

- **Kurangnya minat anak untuk bersekolah**

Penyebab anak putus sekolah juga datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah. Hal ini terjadi pada kasus pertama yang dialami oleh M. Kadir Panrita siswa SDN 14

Lapongkoda yang dikarenakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya yang menyebabkan adanya perubahan sikap oleh sang anak yang malas dan tidak berminat lagi untuk ke sekolah. Hal ini juga dialami oleh Ari Wardana siswa kelas IV (empat) SDN 201 Wewangrewu yang dikarenakan sifat anak yang awalnya sering membolos sekolah yang kemudian berdampak pada minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi. Kasus lainnya terdapat di SMAN 1 Sabbangparu, dari penjelasan bagian kesiswaan sekolah dimana beberapa anak yang berhenti bersekolah karena keinginan sendiri atau bisa dikatakan minat anak untuk bersekolah telah tidak ada lagi.

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

- **Keadaan keluarga yang tidak harmonis**

Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa

depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya. Orang tua merupakan orang yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang hak anak terhadap pendidikannya.

Namun, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah. Hal ini terjadi pada M. Kadir Panrita siswa SDN 14 Lapongkoda yang dikarenakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya sehingga minat anak untuk bersekolah berkurang, dimana pihak sekolah yang telah berupaya untuk menghubungi orang tua dalam hal ini ibu dari Kadir Panrita agar anaknya dapat kembali bersekolah seperti teman sebayahnya, namun tidak mendapat respon apapun dari ibu Kadir Panrita.

- **Lemahnya ekonomi keluarga**

Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar anak.

Berdasarkan kasus ketiga yang dialami oleh keluarga Bapak Muh. Nure dan Ibu Suarni yang terjadi karena lemahnya ekonomi keluarga mengakibatkan anak tidak dan atau putus sekolah. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua untuk menangkap ikan di sungai atau danau, karena dianggap meringankan beban orang tua anak diajak ikut orang tua untuk bekerja dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama yang berdampak pada berhenti atau anak putus sekolah.

Hal ini juga terjadi pada keluarga Bapak Amir dan Ibu Hasnani, dimana pekerjaan Bapak Amir yang hanya sebagai buruh pengangkut semen dengan penghasilan Rp. 50.000,- per harinya dirasa pas-pasan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya dan ditambah lagi harus memenuhi

kebutuhan atau keperluan sekolah anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dikarenakan hal tersebut dianggap dapat meringankan beban orangtua.

- **Teman sepergaulan**

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif.

Suasana lingkungan sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bagi anak. Lingkungan yang tentram, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Seperti halnya dengan teman sepergaulan yang pastinya akan memberi dampak pada sang anak, baik itu bernilai positif ataupun negatif. Hal ini terjadi pada Muhammad Akbar (kasus keempat) dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya dimana sehari-harinya bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya yang menyebabkan dia sering membolos sekolah serta terpengaruh dengan gaya hidup temannya yang merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bergaul dan berteman dengan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar menuntut ilmu. Bila kita menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu.

Selain itu, bergaul dengan orang yang berpengetahuan juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita merasa dapat diterima oleh lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian akan terjalin kerja sama bantu membantu antara sesamanya di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Bagaimanapun juga adanya pergaulan ini mempunyai pengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak dan lain sebagainya dari setiap individu. Dimana pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

- **Kondisi lingkungan tempat tinggal anak**

Kondisi lingkungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tersedianya tempat pendidikan yakni sekolah pada suatu daerah. Namun, di Kabupaten Wajo sendiri dalam segi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini jumlah sekolah pada setiap tingkat pendidikan telah cukup memadai, tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat kecamatan di Kabupaten Wajo yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas

(SMA). Hal ini mengakibatkan masyarakat yang ingin lanjut sekolah harus melanjutkan pendidikan SMA di kecamatan lain yang memiliki SMA/ sederajat. Dari persoalan ini banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, serta jarak tempat tinggal dengan sekolah yang lumayan jauh menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah, jelas Kasubag. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Tanasitolo, bapak Muhammad Anis saat diwawancarai Senin 17 Februari 2014, Pukul 10.56 WITA.

- **Pernikahan dini**

Berdasarkan kasus yang terjadi di SMAN 1 Sabbangparu pada kelas XI (sebelas) terdapat 2 anak yang berhenti sekolah karena keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang sementara masing-masing mengenyam pendidikan seperti teman sebayahnya ataupun anak seusia mereka, yang banyak terjadi pada kaum hawa.

Pernikahan dini yang terkadang berakibat pada terhentinya salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini terhenti pendidikannya. Namun membiarkan anak putus sekolah adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak seumuran mereka.

- **Pandangan masyarakat akan pendidikan**

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di bangku sekolah. Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan masyarakat yang keterbelakangan atau tradisional, masyarakat yang maju tentu pendidikan mereka maju pula, demikian pula anak-anak mereka akan menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibanding dengan orang tua mereka.

Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, mempengaruhi, buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak anak-anak ajakan membantu orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis, juga karena anggapan mereka tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini terjadi pada kasus kelima yang dialami oleh keluarga Bapak Amir dan Ibu Hasnani yang pandangannya terhadap pendidikan mewakili masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang nantinya.

Namun, tidak dipungkiri masih adanya sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada yang orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang yang berada. Budaya seperti ini juga nampaknya masih mengakar di masyarakat.

Masih kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting pendidikan mengakibatkan sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Bapak H. Jasman Juanda bahwa:

“di Kabupaten Wajo sendiri, perhatian dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa dikatakan masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah terkadang dikarenakan karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tapi masyarakat belum mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga banyak orang menyesal dikemudian hari”. (wawancara, Senin 2 Maret 2015, Pukul 12.47)

Padahal fungsi pendidikan nasional bukan demikian, hal ini sebagaimana tergambar dan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, pasal 3:

“pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan upaya tujuan nasional.”

Demikian juga tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimana juga yang termuat dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, pasal 4:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”

Masyarakat yang jika memahami fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasarnya sedikit sekali yang sesuai dengan kehendak mereka, misalnya begitu tamat sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Mungkin jika pendidikan yang ada itu dapat sesuai dengan kehendak mereka maka masyarakatpun juga akan mendukungnya, namun semua itu hanya keinginan mereka tanpa harus berjuang dan berusaha secara maksimal. Masyarakat dalam hal ini harus memiliki pandangan dan tanggung jawab akan pentingnya pendidikan bagi setiap individu bagi mereka dan lebih mendukung

setiap program pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo. Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun setiap elemen seperti masyarakat memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi hak dasar setiap anak akan pendidikan sesuai dengan salah satu arah pembangunan Kabupaten Wajo dalam pelayanan hak dasar yang diprioritaskan adalah hak atas layanan dan peningkatan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Wajo.
- b. Pemberian bantuan dana
- c. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin

- d. Program BSM (Bantuan Siswa Miskin)
- e. Sosialisasi kepada masyarakat

5.1.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah

Kondisi obyektif (gambaran umum) mengenai studi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo di tahun 2014 mencapai angka 703 anak, yang kemudian terbagi di beberapa tingkatan pendidikan sekolah, di tingkat SD jumlah anak putus sekolah berjumlah 389 anak, di tingkat SMP berjumlah 145 anak, dan di tingkat SMA berjumlah 169 anak. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah antara lain:

- a. Kurangnya minat anak untuk bersekolah
- b. Keadaan keluarga yang tidak harmonis
- c. Lemahnya ekonomi keluarga
- d. Teman sepergaulan
- e. Kondisi lingkungan tempat tinggal anak
- f. Pandangan masyarakat akan pendidikan

5.2. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap wilayah Pemkab Wajo secara merata. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu

kebijakan yang menjadi pegangan dalam menekan angka anak putus sekolah.

2. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di Kabupaten Wajo dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.
3. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat mengikat terhadap setiap anak untuk menyelesaikan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, sehingga kedepannya setiap masyarakat dapat mengikuti proses pendidikan formal sebagai sebuah keharusan dalam peningkatan mutu dan kulaitas masyarakat
4. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam menekan angka anak putus sekolah secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah kabupaten hingga desa dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menekan angka anak putus sekolah demi pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Indar. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mudyahardjo, Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Saleh, Hasrat Arief dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi*.
- Sarundajang, S.H. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"*. Refika Aditama: Bandung.

Sumarjono, Selo. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Rineka Cipta: Yogyakarta.

Syafaruddin dan Anzizhan. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Grasindo: Jakarta.

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Gitamedia Pres: Jakarta.

INTERNET

http://wajokab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_2/publikasi/files/search/searchtext.xml

<http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm>

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo